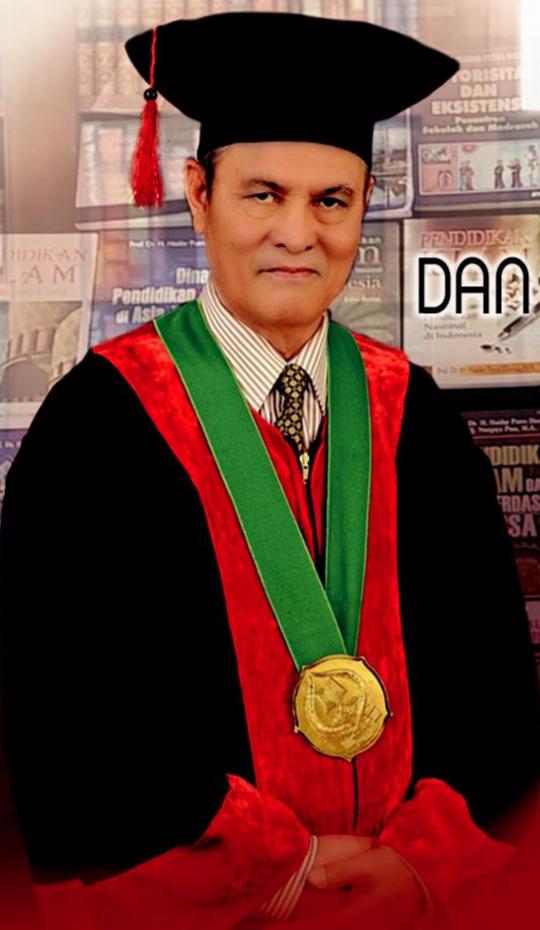


DINAMIKA DAN PEMIKIRAN

PENDIDIKAN ISLAM

KAJIAN KLASIK
DAN KONTEMPORER



KONTRIBUTOR: PROF. DR. HASAN ASARI, MA. ET AL.

Dinamika dan Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Klasik dan Kontemporer

Mesiono, Zaini Dahlan, Junaidi Arsyad (Ed.)

DINAMIKA DAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

Kajian Klasik dan Kontemporer

70 Tahun
Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA

Guru Besar Sejarah Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Kontributor:
Prof. Dr. Hasan Asari, MA. *et al.*



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

**DINAMIKA DAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM
Kajian Klasik dan Kontemporer**

Editor: Mesiono, Zaini Dahlan, Junaidi Arsyad

Copyright © 2019, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224 Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-
7347756 E-mail: perdanapublishing@gmail.com Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: September 2019

ISBN 978-623-7160-41-0

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku
ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor UIN Sumatera Utara.....	vii
Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.....	x
Sambutan Prof. Dr. Usman Pelly, M.A., Ph.D	xii
Pengantar Editor	xiv
Daftar Isi	xv

BAB I

BIOGRAFI DAN POKOK-POKOK PIKIRAN	1
1. Biografi Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA	3
2. Pokok-Pokok Pikiran Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA dalam Bidang Pendidikan Islam.....	50

BAB II

PENDIDIKAN ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH; Dari Masa Klasik Sampai Indonesia Kontemporer	83
1. Prof. Dr. Al Rasyidin, M.Ag – Pendidikan Islam di Masa Rasulullah SAW: Sejarah dan Pemikiran	85
2. Dr. Sahkholid Nasution, MA – Sejarah Pertumbuhan Sintaksis Bahasa Arab	100
3. Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA – Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah	113
4. Prof. Dr. Hasan Asari, MA – Kajian Sejarah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; Sebuah Pengamatan Awal.....	139
5. Dr. Ja'far, MA – Al Jam'iyyatul Washliyah dan Budaya Kitab Kuning	160

6. <i>Dr. Abdillah, M.Pd</i> – Al Jami'yatul Al-Washliyah dan Inovasi Pendidikan Islam	167
7. <i>Dr. Neliwati, M.Pd</i> – Dinamika Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Modern Ar-Raudhatul Hasanah Kota Medan	200
8. <i>Dr. Mardianto, M.Pd</i> – Lorong Waktu: Strategi Pembelajaran Sejarah	217

BAB III

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA, FILSAFAT, DAN POLITIK

233

1. <i>Dr. Salminawati, MA</i> – Kedudukan Etika dalam Pendidikan Islam.....	235
2. <i>Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag</i> – Penerapan <i>Punishment</i> dalam Pendidikan Islam; Kasus <i>Ta'zir Khalifah 'Umar Bin Al-Khaththab</i>	249
3. <i>Dr. Masganti Sit., M.Ag</i> – Pendidikan Anak di Zaman Now; Tinjauan Pendidikan Islam.....	266
4. <i>Dr. Siti Halimah, M.Pd</i> – Manfaat dan Tujuan Integrasi Nilai-Nilai Agama dan Moral ke dalam Mata Pelajaran Umum	276
5. <i>Dr. Tarmizi, M.Pd</i> – Analisis Hadis Fitrah dan Relevansinya Pada Teori Pendidikan.....	287
6. <i>Dr. Eka Susanti, M.Pd</i> – Ibn Rusyd: Pemikiran dan Pengaruhnya di Barat.....	303
7. <i>Dr. Ira Suryani, M.Si</i> – Pendidikan Tauhid Pada Anak Remaja di Era Milenial	319
8. <i>Dr. Zulfahmi Lubis, Lc, MA</i> – Urgensi Politik Bagi Pendidikan Islam: Studi Kasus Politik Pendidikan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi.....	328

BAB IV

MANAJEMEN, INOVASI DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ISLAM

341

1. <i>Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd</i> – Manajemen Berbasis Sekolah: Keputusan Politis Sebagai Wujud Politik Pendidikan Nasional.....	343
--	-----

2. <i>Dr. Candra Wijaya, M.Pd</i> – Prinsip Implementasi Pengembangan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	357
3. <i>Dr. Muhammad Rifa'i, M.Pd</i> – Strategi Inovasi Pendidikan Islam.....	370
4. <i>Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag</i> – Supervisi Pengajaran dan Penilaian RPP.....	388
5. <i>Dr. Yusuf Hadijaya, M.Pd</i> – Dinamika Manajemen Pendidikan Tinggi: Sebuah Analisis Terhadap Fungsi Perencanaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	400
6. <i>Dr. Indra Jaya, M.Pd</i> – Menggapai Status Guru Profesional di Indonesia	414
7. <i>Dr. Sholihatul Hamidah Daulay, M.Hum</i> – A Brief of Homeschooling in Indonesia.....	424
8. <i>Dr. Rusydi Ananda, M.Pd</i> – Kontribusi Pendekatan Sistem dalam Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran.....	437

BAB V

KOMUNIKASI, PSIKOLOGI DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM.....	451
1. <i>Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA</i> – Konseling Islami; Layanan dalam Pendidikan	453
2. <i>Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi, Psikolog</i> – Keterkaitan Pendidikan Islam dan Psikologi Positif	464
3. <i>Dr. Akmal Walad Ahkas, M.Pd</i> – Kepemimpinan Berbasis Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual.....	483
4. <i>Dr. Amiruddin MS, MA</i> – Konsep Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Islam.....	502
5. <i>Dr. Salim, M.Pd</i> – Pendidikan yang Membelajarkan dan Kegiatan Sepanjang Hayat	520
6. <i>Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA</i> – Proses Pembelajaran Melalui Interaksi Edukatif dalam Pendidikan Islam.....	537

Dinamika dan Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Klasik dan Kontemporer

7. <i>Rahmah Fithriani, M.Hum, Ph.D</i> – Zone of Proximal Development and The Study of Feedback in Second Language Writing	556
8. <i>Dr. Didik Santoso, M.Pd</i> – Developing English Materials For Mathematics Education Department Students	568
9. <i>Dr. Tien Rafida, M.Hum</i> – Kesantunan Berkomunikasi dalam Perspektif Islam	580
DOKUMENTASI ILMIAH.....	595
BIODATA PENULIS	614
BIODATA EDITOR.....	6

DINAMIKA MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI: Sebuah Analisis Terhadap Fungsi Perencanaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Dr. Yusuf Hadijaya, M.A.

A. Pendahuluan

Perencanaan adalah dasar bagi tindakan administrasi yang berhasil. Rencana adalah proses yang diikuti oleh seorang pemimpin/manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapainya dan bagaimana dia mencapainya. Begitu pentingnya fungsi perencanaan tersebut dapat kita cermati dari bagaimana George R. Terry dalam bukunya “*Principle of Management*” merumuskan fungsi-fungsi administrasi/manajemen sebagai Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organising*), Tindakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*) yang disingkat menjadi *POAC*. Sedangkan Robbins dan Coulter mengklasifikasikannya atas empat fungsi, yaitu: *Planning*, *Organizing*, *Leading*, dan *Controlling* yang disingkat menjadi *POLC*. Sementara Luther Gullick dalam bukunya “*Papers on the Science of Administration*” merumuskan fungsi-fungsi administrasi sebagai Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organising*), Penyusunan Staf (*Staffing*), Pengarahan (*Directing*), Pengkoordinasian (*Coordinating*), Pelaporan (*Reporting*), dan Penganggaran (*Budgeting*) yang disingkat menjadi *POSDCORB*. Kesemua ahli tersebut memasukkan perencanaan sebagai langkah pertama sebelum fungsi-fungsi manajemen lainnya dapat dilanjutkan pelaksanaannya.

Sektor industri dengan kecepatan dan kompleksitas organisasi produksinya merupakan konteks sosial budaya yang melahirkan ilmu manajemen. Kita saat ini berada di Era Revolusi Industri Generasi ke-4 yang mencerminkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang dimanfaatkan untuk menopang pengembangan sektor industri yang memproduksi barang atau jasa dengan nilai tambah yang luar biasa.

Pada Era Revolusi Industri Generasi Pertama, perencanaan konvensional yang dibuat dengan analisis kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threat*) masih memadai. Revolusi Industri 0.1 terjadi di Inggris pada tahun 1776. Produksi barang-barang ketika itu sudah berskala besar dalam kuantitas dan mutu barangnya juga sudah mendapat perhatian yang besar dari para industrialis sebagai pemilik modal. Tempat kegiatan produksi juga telah berpindah dari rumah-rumah ke tempat khusus yang dinamakan pabrik. Kegiatan industri di pabrik ini mengakibatkan para manajer ketika itu membutuhkan teori yang mampu membantu mereka dalam memprediksi permintaan, memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup, pembagian tugas kepada bawahan, merancang struktur organisasi yang dibutuhkan, mengkoordinasikan berbagai kegiatan perusahaan, menyusun anggaran/biaya operasional, dan lain-lain, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli.

Di era Revolusi Industri Generasi ke-2 bentuk perencanaan telah berkembang menjadi Perencanaan Strategis yaitu suatu pengembangan model perencanaan yang telah diintegrasikan dengan konsep strategi untuk pencapaian tujuannya. Perencanaan strategis sudah diterapkan sebagai salah satu pendekatan baku manajemen kelembagaan di Indonesia. Selanjutnya di Era Revolusi Industri Generasi ke-3 seiring dengan pemberian dan peningkatan kualitas organisasi bisnis/pemerintah, *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan salah satu inovasi yang paling penting dalam perencanaan strategis di abad ke-21 yang bermuara pada perbaikan kinerja organisasi/institusi telah diterapkan secara meluas di dunia. Chen & Shiao (2006) melakukan penelitian bagaimana *Balanced Scorecard* (BSC) dapat digunakan untuk evaluasi kinerja sebagai sebuah alat manajemen strategis pada sektor pendidikan tinggi di Taiwan. Sedangkan di Era Industri Generasi ke-4, ilmu manajemen telah mengalami perkembangan dengan diperkenalkannya model perencanaan strategis yang revolusioner, yaitu *Blue Ocean Strategy* (BOS) dengan motto *Don't Compete with Rivals, Make Them Irrelevant*. Prinsip Formulasi Strategi pada BOS ini adalah keluar dari kebiasaan berpikir industri tersebut dengan menciptakan ruas pasar (*Market Space*) baru yang berfokus pada peningkatan nilai tambah luar biasa pada pelanggan (*Value Innovation*).

Perencanaan di bidang pendidikan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan berbagai program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal. Pendidikan bukan hanya sekadar untuk mencetak

Dinamika dan Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Klasik dan Kontemporer

generasi yang pekerja keras, namun yang lebih penting adalah mencetak generasi pekerja keras yang cerdas sehingga bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang kompetitif.

B. Sejarah Pengorganisasian Lembaga Pendidikan di Indonesia

Pada masa sebelum kemerdekaan, Pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah sebenarnya tidak bertujuan untuk mencerdaskan kaum pribumi, tetapi adalah demi mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah bagi kepentingan kolonial penjajah sendiri. Kaum pribumi ketika itu, seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Soekarno, Moh. Hatta, M. Natsir, Agus Salim, Ki Hadjar Dewantara, dan Panglima Besar Soedirman merupakan produk pendidikan kolonial Belanda yang bermutu. Sekalipun para pahlawan nasional itu memiliki latar belakang pendidikan Belanda, namun mereka tetaplah memiliki komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan negerinya.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia (1945-1950), barulah pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun perhatian pendidikan pada masa ini adalah menggelorakan semangat ke-Indonesiaan sebagai bangsa merdeka. Ki Hadjar Dewantara diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia, walaupun masa jabatannya hanya sekitar setahun. Pada 1947 dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang tugasnya adalah membuat fondasi dan struktur pengajaran baru. Pada era Demokrasi Liberal (1951-1959) dihasilkan Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 sebagai payung hukum legal formal di bidang pendidikan. Dalam Kabinet Kerja I di Era Demokrasi Terpimpin, 10 Juli 1959-18 Februari 1960, kementerian yang membidangi pendidikan dibagi menjadi Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil, Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat. Di era ini terjadi konfrontasi dengan Belanda dalam persoalan Irian Barat, hingga terjadinya pemberontakan G30S/PKI yang mengancam bangsa Indonesia.

Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru masa kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun, di antaranya adalah kewajiban mengikuti penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

pendidikan dan Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Klasik dan Kontemporer

nesia (P4) bagi peserta didik, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, penit sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.

Pada masa kabinet pertama di era Reformasi (1998-sekarang) yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Pada tahun 2011, masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan pendidikan karakter lain-lain.

Pada tahun 2014 masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dirombak dengan memisahkan, dan memasukkan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi yang berdiri sejak tahun 1962 yang berubah namanya menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Selain lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Kemenristekdikti juga mengelola Perguruan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (tidak termasuk Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di bawah Kementerian Agama, dan tidak termasuk juga Perguruan Tinggi Kedinasan yang berada di bawah Kementerian/Lembaga masing-masing) dan Perguruan Tinggi Swasta melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Kemenristekdikti juga mengkoordinasikan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Di antara fungsi baru yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi.

C. Tinjauan Historis Perencanaan Pendidikan Islam di Indonesia

Fuad Jabali dan Jamhari (2002:120) mengemukakan bahwa pendirian sekolah-sekolah/lembaga pendidikan Muhammadiyah di tahun-tahun sekitar 1912 M, dalam konteks historisnya, merupakan respons terhadap

sistem pendidikan pesantren yang pada awal abad ke-20 itu dianggap tidak cukup memadai lagi bagi perkembangan dan kehidupan sosial umat Islam, menyusul modernisasi pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Menurut Agus Salim (2003:43), demikian pula dengan sejarah Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan sejarah panjang pergerakan umat Islam di Indonesia yang melibatkan proses institionalisasi pendidikan sebagai bagian penting di dalamnya. Melalui pendidikan, khazanah, dan paham keagamaan serta upaya penguatan umat dapat dilakukan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Demikian pula dengan pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Al Washliyah, Al Ittihadiyah, Al Irsyad dan lain-lainnya

M. Natsir merupakan salah satu di antara sekian banyak pahlawan nasional yang mengenyam pendidikan kolonial Belanda, namun ia tidak tergerak untuk melakukan westernisasi atau sekularisasi dunia pendidikan Islam. Sebenarnya, langkahnya ini yang peduli terhadap dunia pendidikan Barat disebabkan setelah dia membaca karangan Snouck Hurgronje yang melawan Islam, seperti *Netherland en de Islam* yang memaparkan strategi Hurgronje dalam melawan Islam. Buku ini pada akhirnya kemudian membuat Natsir bertekad melawan Belanda lewat jalur pendidikan.

D. Analisis Terhadap Praktik Manajemen Pendidikan di Indonesia

Para pejabat di birokrasi yang mengelola pendidikan nasional menginspirasi dan menggerakkan rantai birokrasinya untuk meningkatkan kinerjanya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di tingkat kementerian. Penyelenggara pendidikan di kabupaten/kota/provinsi memiliki sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program-program pendidikan yang disusun dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Pendidikan (RIPP) yang menjadi acuan utama adalah isu-isu strategis bidang pendidikan. Selain itu penyusunan RIPP juga mengacu pada kebijakan umum pendidikan tingkat nasional dan standar pelayanan minimum bidang pendidikan provinsi yang terhubung dengan Renstra Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam laporan projek USAID (2005: 5) contoh yang baik dalam bidang Manajemen Pendidikan (*Good Practices in Management of Education*) dijelaskan bahwa perencanaan pendidikan yang baik adalah:

perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat dan relevan yang terus diperbaharui sesuai perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan.

Pengumpulan data dan informasi dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia saat ini sudah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang meliputi aplikasi Data Pokok Pendidik (Dapodik), SIM Tunjangan (SIMTUN), SIM Kepegawaian (SIMPEG), aplikasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), Portal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Litapdimas), Portal *Science and Technology Index* (SINTA), dan sebagainya. Perencanaan pendidikan haruslah realistik melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dan seksama, karena data pada SIM pendidikan itu baru merupakan angka-angka saja namun belum mencerminkan kondisi detail dan kondisi sesungguhnya dari setiap variabel data yang dikumpulkan/dimiliki.

Berkaitan dengan otonomi kampus, perguruan tinggi harus memperhatikan terhadap apa yang harus diketahui dan dikuasai oleh para mahasiswanya untuk menunjang kemampuan mereka dalam hal menghasilkan suatu keunggulan dan sumbangsih bagi kemajuan dan perkembangan masyarakatnya secara luas. Ada lima kebutuhan dasar: (1) Untuk kemantapan kehidupan politis, (2) Untuk kelancaran dan kekuatan ekonomi, (3) Untuk keberlangsungan masyarakatnya, (4) Untuk kemajuan budayanya, dan (5) Untuk integritas moral dan etika untuk mencapai cita-cita bangsa dan mewariskannya kepada generasi-generasi selanjutnya.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 (2010:i) diterangkan bahwa Renstra Kemdiknas 2010-2014 mengacu pada visi RPJMN 2010-2014 yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; serta Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 yang telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005-2009), penguatan pelayanan (2010-2015), penguatan daya saing regional (2015-2020), dan penguatan daya saing internasional (2020-2025).

Selanjutnya, setelah Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud dilebur ke Kemenristek dan menjadi Kemenristekdikti, dalam dokumen Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (2015:21) dicantumkan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional,

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kemenristekdikti dan mencermati potret permasalahan-permasalahan yang dihadapi maka Kemenristekdikti menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa". Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kemenristekdikti mencakup upaya menjawab permasalahan dalam aspek pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.

Dalam dokumen Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 (2015: 22) dicantumkan bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi Kemenristekdikti seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) yang harus dicapai adalah: "Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa". Dalam rancangan lima tahun, indikator kinerja tujuan strategis diukur dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019 ditargetkan berada pada peringkat 56 besar dunia dengan nilai 5,0 dan indeks inovasi Indonesia pada tahun 2019 yang ditargetkan berada pada peringkat 26 besar dunia dengan nilai 4,4.

E. Peran Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara Medan

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di UINSU, sesuai dengan namanya, mempunyai tugas dalam penyusunan kurikulum, pengembangan sumberdaya, pelaksanaan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen pendidikan Islam. Selain itu juga bertugas untuk menyediakan materi-materi rujukan bagi penggalian dan pengembangan konsep, prinsip, teori, dan praktik manajemen pendidikan Islam.

Fungsi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang berbeda dengan program studi-program studi lainnya di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) adalah dalam hal mengikuti perkembangan Sistem Pendidikan Nasional (SPN), inovasi pendidikan, dan menganalisisnya dari perspektif Manajemen Pendidikan. Peranannya adalah memberikan

kontribusi dalam hal mendiskusikan dan menganalisis kebijakan pendidikan aktual, sehingga mampu berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Dalam hal perencanaan, Lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam diharapkan mampu membuat perencanaan pendidikan di tingkat lokal, regional, dan nasional serta menjadi konsultan manajemen pendidikan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan/pengendalian.

Dalam Borang Akreditasi Program Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan (2017:2-3) dicantumkan bahwa Visi Program Studi memiliki fungsi sangat strategis. Visi Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam adalah “Menjadi Program Studi yang efektif dalam menghasilkan magister pendidikan Islam yang profesional dan mampu memajukan Manajemen Pendidikan Islam tahun 2025.”

Dalam Borang Akreditasi Program Magister Manajemen Pendidikan FITK UINSU (2017:3) dicantumkan bahwa Misi Program Magister ini yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermuara pada kemampuan filosofis dalam memahami ilmu Manajemen Pendidikan Islam dan merespon permasalahan pendidikan Islam kontemporer;
2. Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam, dan memfasilitasi penelaahan kritis terhadap hasil-hasil penelitian yang ada;
3. Mengembangkan kemampuan memahami berbagai masalah Manajemen Pendidikan Islam dan merumuskan format baru yang inovatif tentang pendidikan Islam yang lebih baik pada masa yang akan datang;
4. Membangun hubungan kerjasama/*networking* dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan penelitian ilmiah dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam.

F. Dinamika Perencanaan Pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

Hadijaya (2012:15) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa depan secara optimal. Dalam perencanaan meliputi beberapa tahapan

Dinamika dan Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Klasik dan Kontemporer

yaitu, perencanaan yang bersifat totalitas dengan melibatkan seluruh komponen internal organisasi dan lingkungan eksternalnya, perumusan tujuan, pembuatan kebijaksanaan, penetapan anggaran, pembuatan prosedur, dan perumusan standar hasil yang akan dicapai pada rentang waktu tertentu.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi dapat dipertimbangkan strategi peningkatan mutu selektif kompetitif. Kondisi pendidikan tinggi, relatif sudah berjalan sesuai prioritas bagi mutu yang tinggi dan untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi yang bergengsi sudah harus benar-benar melalui seleksi yang ketat. Untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi di perguruan tinggi sudah ada beberapa Perguruan Tinggi Negeri, baik yang berada di bawah Kemenristekdikti, seperti Universitas Diponegoro yang menambah alokasi anggaran menjadi sekitar Rp. 40 miliar, meningkat hingga sekitar 600% dari tahun-tahun sebelumnya untuk menggenjot penelitian sejalan dengan visi sebagai universitas riset (Tempo.co, 10 Maret 2017) ataupun yang berada di bawah Kementerian Agama seperti UIN Jakarta yang akan mengalokasikan hibah riset 30% dari dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk memperkuat riset internasional dosen, riset universitas dengan pemerintah daerah dan industri, dan memperkuat riset di kalangan mahasiswa (Risa D/Ikhda K/ZM, 30 April 2016). Persyaratan menjadi universitas riset dinilai cukup berat karena 25% pembiayaan operasional berasal dari kegiatan riset, kerja sama industri, dan hak kekayaan intelektual. Hal itu dikatakan mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bambang Soehendro, di Yogyakarta, 2 Januari 2012 (detikNews, 02 Januari 2012). Dalam perkembangannya wacana tentang universitas riset terutama dalam konteks kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia industri kembali mengemuka seiring dengan misi untuk mewujudkan universitas riset berkelas dunia.

G. Penutup

Perencanaan adalah dasar bagi keberhasilan tindakan administrasi yang diikuti oleh seorang pemimpin/manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapainya dan bagaimana dia mencapainya. Menurut Castetter (1996:38) perencanaan merupakan cara manusia memproyeksikan niat terhadap apa yang ingin dicapai. Karena

perencanaan berkaitan dengan konsep masa depan, masalah-masalah yang membutuhkan imajinasi dan pilihan, pemikiran disengaja dengan melihat masa lampau, dan dicapai melalui rancangan, perencanaan merupakan antitesis dari keadaan yang telah dianggap layak pada masa sekarang, gaya kepemimpinan *laissez-faire*, dan kinerja yang tak terarah.

Bila bangsa Indonesia tidak mampu membuat perencanaan pendidikannya yang dapat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di zaman ekonomi global saat ini, maka bangsa ini akan menjadi sasaran empuk sebagai daerah pemasaran produk negara-negara maju dan penyedia tenaga kerja murah, sehingga situasinya akan mirip seperti kembali pada zaman eksloitasi terhadap Sumber Daya Alam dan SDM kita seperti zaman penjajahan dahulu namun dibalut dengan cara-cara yang lebih beradab, tetapi pada intinya sama saja, terhalang secara tidak langsung untuk memperoleh/menciptakan pendidikan yang bermutu, bangsa yang lemah tak berdaya, banyak hutang yang pada akhirnya boleh jadi dapat dijadikan alat untuk mendikte atau mengatur kepentingan negara kreditur.

Sebagai insan dalam dunia pendidikan, kita harus malu menjadi generasi pengisi kemerdekaan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia dahulu, bila kita tidak memiliki keberanian dan keahlian, bahkan ketika sudah menjadi bangsa yang merdeka untuk berjuang menanggung segala beban, kesulitan, risiko, dan tantangan dalam berjuang membangun dunia pendidikan yang bermutu di negeri sendiri yang kaya raya dengan Sumber Daya Alamnya. Oleh karena itu, kita harus memiliki komitmen untuk memecahkan persoalan tersebut melalui pembuatan berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang mampu mendorong tumbuhnya penemuan dan inovasi industrial yang mengarah kepada kemandirian bangsa. Potensi yang dimiliki dunia pendidikan tinggi di Indonesia sesungguhnya besar yang tergambar dari jumlah perguruan tinggi di tahun 2005 saja sudah didirikan 86 Perguruan Tinggi Negeri yang terdiri dari rata-rata 2 sampai 3 Perguruan Tinggi Negeri di setiap provinsinya dengan jumlah provinsi 33 dan terdapat sekitar 2.200 Perguruan Tinggi Swasta, dan mendidik sekitar 3,5 juta mahasiswa. Namun, bila perencanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi salah atau tidak serius, potensi itu justru dapat menjadi kelemahan yaitu menjadi beban anggaran nasional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dari segi kembalian dan hasil pendidikannya, menghasilkan masyarakat yang konsumerisme namun tidak produktif, dan bertambahnya jumlah lulusan yang tidak bermutu sehingga dapat menambah jumlah pengangguran terdidik.

Setelah lebih dari empat dasawarsa pembangunan industri, Indonesia masih tergolong sebagai negara pengimpor teknologi maju, yakni melalui mekanisme lisensi teknis, investasi langsung asing, impor barang modal, dan kegiatan perdagangan internasional (Thee, 2005). Tak heran bila ditinjau lebih lanjut berdasarkan faktor tingkat perkembangan teknologi, daya saing negara kita berada jauh di posisi ke-91.

Dosen memiliki peran strategis bagi peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Bagi negara berkembang, hal tersebut menjadi lebih jelas lagi kedudukannya, karena kondisi sektor pendidikan tinggi kita yang masih tergolong minim sumber daya yang dimilikinya, seperti pendanaan, metode, dan sarana/prasarana. Artinya, pada akhirnya SDM inilah sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang menjadi faktor penentu mau menjadi apa dan bagaimanakah kita. Untuk itu, dalam penyusunan renstra dan kebijakan Kemenristekdikti nampaknya harus mempertimbangkan dan memperhatikan moral dosen sebagai awak pembangunan pada sektor pendidikan tinggi. Kita boleh saja mematok standar yang tinggi untuk kinerja dosen dan perguruan tinggi, yang penting jangan dilupakan proses dan tahapan-tahapan pencapaiannya harus realistik, rasional, dan jangan dibuat dengan ketergesa-gesaan. Bangun kesadaran dan tingkatkan semangat juang para dosen, maka yakinlah dosen akan menjadi pejuang-pejuang di garis depan yang pantang menyerah dalam perjuangan meningkatkan mutu dan produktivitas pada pendidikan tinggi. McGregor mengemukakan Teori Y, seperti yang dikutip oleh Manullang (2008:172), bahwa: motivasi kerja, potensi untuk berkembang, kapasitas untuk memikul tanggung jawab, dan kesediaan untuk mengarahkan perilaku ke arah perwujudan tujuan-tujuan organisasi, kesemuanya terdapat di dalam diri individu, tetapi menjadi tanggung jawab manajemen di dalam pengembangannya.

Penggunaan landasan filosofis di bidang Pendidikan Islam dalam batas tertentu dapat bersifat eklektik, karena pada hakikatnya setiap aliran filsafat mengandung kebenaran dari perspektif masing-masing aliran tersebut. Namun sesungguhnya dalam perencanaan pendidikan Islam, pandangan dan tuntunan Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah sesungguhnya sudah ada dan sangat memadai. Artinya, perencanaan pendidikan Islam dapat disusun, dilaksanakan serta dievaluasi dengan merujuk pada Alquran dan Sunnah. Di sini dapat kita ambil salah satu contohnya adalah dalam Alquran pada Surah Al-Qamar ayat 17 berikut ini:



وَلَقَدْ يَسَرَّنَا أَلْفَرِءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (Q.S. Al Qamar/54: 17)

Ayat di atas diulangi kembali pada ayat 22, 32, dan 40 dalam surah tersebut. Maknanya bahwa penegasan Alquran terhadap Alquran sebagai sumber pelajaran bagi manusia demikian kuatnya. Dengan mempelajari (*tadarus*) dan merenungi (*tadabur*) isi kandungan ayat-ayat Alquran dan menangkap pesan-pesan pentingnya, maka akan menjadi modal utama bagi pengembangan sikap, rasionalitas, dan keterampilan umat Islam dalam pengembangan ilmu *duniawiyah*/umum, pengetahuan/seni, dan teknologi, serta ilmu-ilmu Keislaman itu sendiri. Menurut Haidar Putra Daulay (2004:183-190), dalam kajian ilmu Alquran yang terkandung di dalamnya ajaran/hikmah wahyu (*perennial knowledge*) dapat dibuktikan kebenarannya melalui ilmu-ilmu hasil ijtihad/perolehan (*acquired knowledge*) dengan kajian filosofisilmiahnya yang meliputi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.

Dalam implementasi berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi, maka setiap kampus di Indonesia berupaya untuk menerapkannya sedaya upaya maksimal, termasuk di bidang perencanaan strategisnya. Demikian pula dengan UIN Sumatera Utara Medan. Dalam Borang Rencana Strategis (Renstra) UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2016-2020 (2016:2) dicantumkan bahwa Renstra tersebut disusun sebagai *blue print* dan pemberi arah bagi pengembangan UIN Sumatera Utara Medan untuk masa lima tahun.

Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*). Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah: melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yangunggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Sedangkan tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah: (1) Lahirnya sarjana yang unggul dalam berbagai kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam, (2) Berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam, dan (3) Berkembangnya Peradaban kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Pernyataan berdasarkan nilai-nilai Islami juga bermakna bahwa

seluruh proses pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dilakukan UIN Sumatera Utara bertujuan agar semua civitas akademika UIN Sumatera Utara menyadari bahwa nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai-nilai Islam; Tauhid, Ikhlas, Ijtihad, Inovatif, *Ta'awun*, Istiqomah, Dinamis, Transparan, Pelayanan Prima, Kemitraan, dan *Accountable*.

Implikasi Ijtihad yaitu dalam mengambil keputusan dan bertindak bagi individu jangan takut salah ketika mencoba suatu metode atau teknik yang baru karena bila individu tersebut takut maka dapat menyebabkan ia menjadi tidak kreatif dan produktif. Ketika kita melakukan kesalahan lalu mengambil hikmah dan memperbaiki cara kerja kita melalui belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan itu, maka dari sanalah kemudian kita dapat menjadi pekerja yang profesional. Demikianlah cara bekerja yang diterangkan dalam Alquran pada Surat Al-Baqarah ayat 30-37, di mana di sana ditegaskan sifat Allah Yang Maha Pengampun.

Prof. Saidurrahman, M.Ag, Rektor UINSU 2016-2020 beserta jajarannya memiliki komitmen yang kuat dan memiliki konsep yang komprehensif untuk peningkatan mutu pendidikan di UINSU saat ini yang merupakan proses berkelanjutan dari perencanaan strategis dan kebijakan pengelolaan institusi dari Rektor-rektor sebelumnya. Ia menekankan tiga hal yang harus dilakukan perbaikan di UINSU yaitu terkait struktur, aparatur, dan budaya akademis untuk berkiprah di kancah nasional dan internasional. Akreditasi Institusi UIN Sumatera Utara Medan sudah terakreditasi B pada tahun 2018 ini. Dalam pencapaian seluruh rencana strategi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2016-2020 yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan UIN Sumatera Utara Medan maka seluruh pendanaan dibebankan kepada anggaran UIN Sumatera Utara Medan yang berasal dari DIPA UIN Sumatera Utara Medan dan juga pendanaan yang berasal dari PNBP BLU.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoname. "Syarat PT Menjadi Universitas Riset Dinilai Sulit". Semarang: DetikNews, 2012.
- Borang Akreditasi Program Magister Manajemen Pendidikan Islam. Medan: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Gastetter, W. B. 6th ed. *The Human Resource Function in Educational Administration*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1996.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hadijaya, Yusuf. Administrasi Pendidikan. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Jabali, Fuad dan Jamhari, Ed. *IAIN dan Modernisasi di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2002.
- Manullang, Belferick. (2006). *Kepemimpinan Pedagogis*. Medan: Program Pascasarjana Unimed.
- Kompas.com. "Berat, Persyaratan Universitas Riset". <https://edukasi.kompas.com/read/2012/01/03/13300389/Berat.Persyaratan.Universitas.Riset>.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014.
- Risa dan Ikhda. "UIN Jakarta akan mengalokasikan hibah riset 30% dari dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri". Jakarta: Berita UINOnline, 2016.
- Salim, Agus. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Jepara: INISNU, 2003.
- Tarigan, Egia. "Kejar Visi Universitas Riset, Undip Semarang Kucurkan Rp 40 M". Semarang: Tempo.co, 2017.
- USAID. Contoh yang Baik Dalam Bidang Manajemen Pendidikan (*Good Practices in Management of Education*). Laporan Projek, 2005.